

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana. Adapun isu hukum yang di bahas di dalam penelitian normative ini yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan ?. Kedua, bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana ?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan (*Statue Approach*, (*Conseptual Approach*), (*case approach*), dan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi peluang dalam mengembalikan kerugian Negara di Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan adanya perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana tidak menghilangkan mekanisme penuntutan pidana atas kejahatan si pelaku di pengadilan. Skema yang digunakan oleh negara maju berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana adalah *unexplained wealth*. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, maka perlu adanya suatu reformasi baik dari segi yuridis, konsep, maupun paradigma yang harus dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan. Oleh karenanya, untuk memberlakukan *unexplained wealth* maka harus terdapat kerangka regulasi yang komprehensif dan akomodatif sebagaimana tampak dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak pidana perpajakan, dan Hukum acara pidana.

CONFIGURATION OF ASSETS OF TAX CRIMINAL OFFENDERS IN A CRIMINAL PROCEDURE LAW PERSPECTIVE

ABSTRACT

The aim of this research is first, to determine and analyze the confiscation of assets of perpetrators of tax crimes from the perspective of criminal procedural law. Second, to find out and analyze future criminal law policies regarding the regulation of confiscation of assets of perpetrators of tax crimes from the perspective of criminal procedural law. The legal issues discussed in this normative research are: First, what are the legal regulations for confiscating assets of perpetrators of tax crimes? Second, what will be the future criminal law policy regarding the regulation of confiscation of assets of perpetrators of tax crimes from the perspective of criminal procedural law? The research method used is normative juridical with approaches (Statue Approach, (Conceptual Approach), (case approach), and (comparative approach). The results of this research show that the Asset Confiscation Bill is an opportunity to recover State losses in Indonesia. This is because, The confiscation of assets without criminal prosecution does not eliminate the mechanism for criminal prosecution of the perpetrator's crimes in court. The scheme used by developed countries regarding the confiscation of assets resulting from criminal acts is unexplained wealth. In the context of the Indonesian legal system, there is a need for good reform juridical aspects, concepts and paradigms that must be implemented synergistically and sustainably. Therefore, to enforce unexplained wealth, there must be a comprehensive and accommodative regulatory framework as seen in the Criminal Asset Confiscation Bill.

Keywords: Confiscation of assets, tax crimes, and criminal procedural law.